



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD FARHANIE**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **861644**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>55.123.600</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 55.123.600		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>159.500.000</b>
1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SOUL SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOTOR, HONDA GL 125 K/ CB MODIF RODA 2 SOLO Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
4. LAINNYA, SEPEDA POLYGON MTB XC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
5. LAINNYA, SEPEDA POLYGON TOURING TOURING Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
6. LAINNYA, SEPEDA SANTACRUZ TALLBOY CC / XC TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
7. LAINNYA, SEPEDA POLYGON STRATTOS 5/ RB Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>81.700.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>96.866.152</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	393.189.752
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	393.189.752

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.